

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan bagian dari mewujudkan aspirasi masyarakat melalui pencapaian visi dan misi . Penetapan dan pengembangan system perencanaan yang tepat , jelas dan proporsional merupakan prasyarat menuju penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan program kegiatan yang berkesinambungan dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah , Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah

Berlakunya regulasi tersebut maka membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) didasarkan pada penjabaran visi, misi kepala Daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) menjadi landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023 Perangkat Daerah (SKPD) , yang di dalamnya memuat sasaran –sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan kurun waktu lima tahun mendatang. Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusun Rencana Perencanaan Strategi Perangkat Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Terima kasih
Pangkajene Sidenreng 2021
Kepala Dinas Komunikasidan Informatika

H.BACHTIAR,SHi,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP.19710122 199203 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i.
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD	30
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	34
3.4 Penentuan Isu-isu Strategi	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	39
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	47
6.1 Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Sidrap Tahun 2019-2023	47
BAB VII INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACUH PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	71
BAB IV PENUTUP	73

...

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun RPJMD Tahun 2018-2023 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan semangat keistimewaan di dalamnya.

Mengacu pada Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan dalam suatu kerangka kerja pembangunan komprehensif dan sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat.

Fungsi dari Rencana Strategis ini adalah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian menterjemahkan secara strategis sistematis dan terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya.

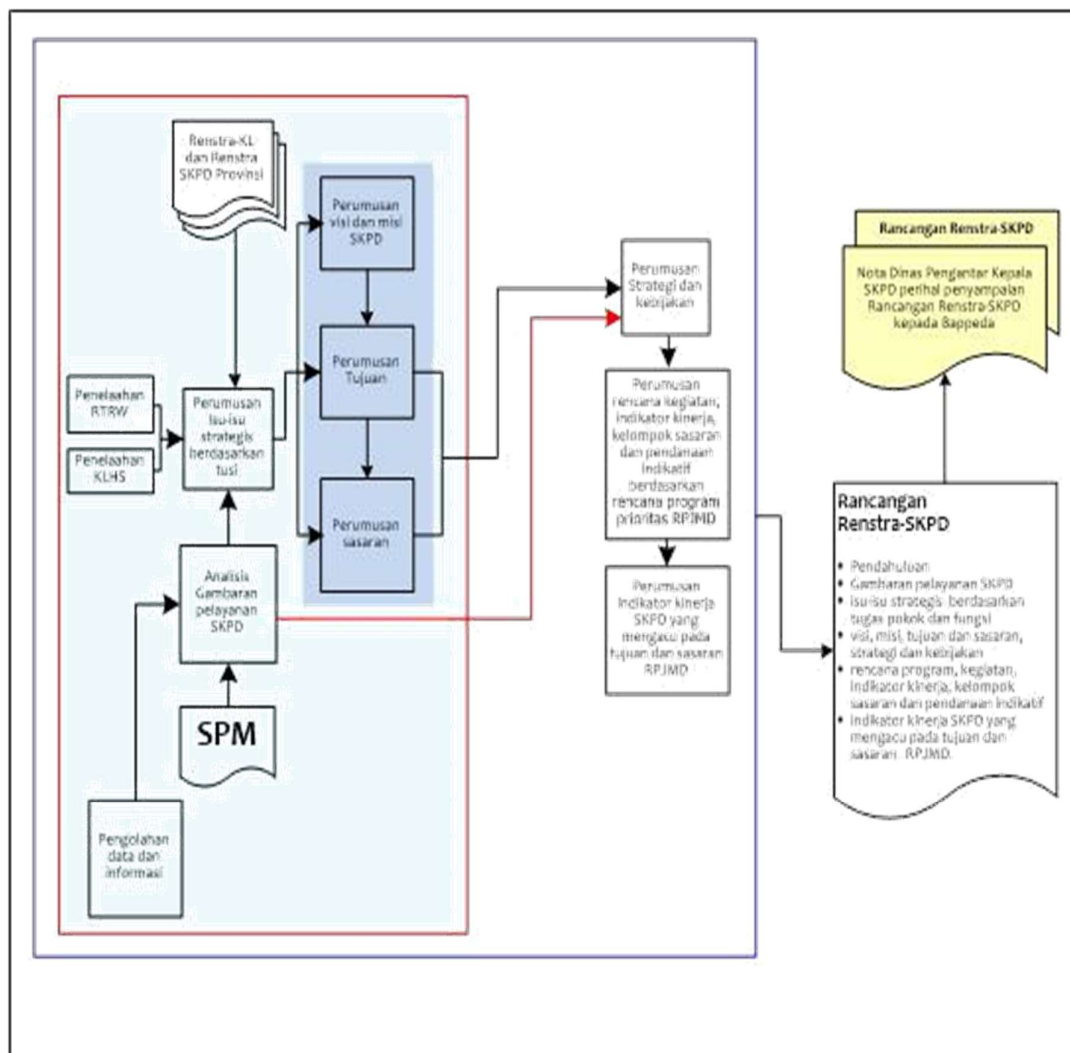
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Perubahan Rencana strategi (Renstra) merupakan suatu dokumen perumusan dari keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah, sehingga salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun Perubahan rancangan rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah) adalah perubahan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama 5 (Lima) tahun baik untuk mendukung visi / misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Perubahan Rencana strategi (Renstra) kementerian/lembaga (K/L) dan rencana strategi provinsi merupakan tolak ukur dalam pencapaian kinerja rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah. Jika capaian rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah melebihi sasaran rencana strategi kementerian/lembaga (K/L) dan rencana strategi (Renstra) provinsi maka, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Perangkat Daerah sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah maka hal ini mengindikasikan bahwa Perangkat Daerah (OPD) tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumberdaya penyelenggaraan pendanaan, prosedur mekanisme pelayanan, dan strategi pelayanan yang ditempuh.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika melalui proses yang transparan, demokratis, partisipatif. Adapun alur pikir penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :



Gambar 1.1

Alur Pikir Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Permendagri No.86/2017 tentang pelaksanaan PP No.8 2008
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 15);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidnereng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26);

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 15);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023.
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023
- 14 Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22a Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Strategis.

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

2. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. Penjabaran Perubahan RPJMD

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

- c. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana strategi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan isu-isu Strategis

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah tahun 2018-2023

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Bab VII Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Tahun 2018-2023

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang tidak bisa lepas dari isu- isu strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan perubahan nomenklatur terhadap perangkat daerah yang ada, termasuk terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

Dalam rangka menggali isu-isu strategis yang dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun kedepan, maka perlu dicari permasalahan-permasalahan dari masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang .

Berikut ini diuraikan identifikasi permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang seperti pada tabel berikut ini.

1. Masih ada daerah yang belum memiliki akses jaringan internet
2. Terbatasnya infrastruktur layanan internet
3. Masalah penyediaan internet berada ditangan pengusaha (misalnya PT.Telkom) bukan di pemerintah daerah, sehingga sulit bagi pemerintah daerah untuk menyediakan jaringan internet jika pelaku usahanya belum tertarik
4. Untuk membangun jaringan internet, investigasi yang dibutuhkan sangat besar dan anggaran pemerintah daerah tidak mencukupi
5. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih sangat terbatas dipublikasikan memalui media
6. Perlunya peningkatan SDM dalam Pelayanan informasi Publik
7. Dibutuhkan sosialisasi edukasi terkait keterbukaan informasi publik

8. Kemitraan dengan media perlu dipertahankan serta pemberdayaan dan pembinaan lembaga komunikasi publik
9. Perlunya peningkatan SDM untuk pembuatan konten seperti infogradi, video, animasi, produk, jurnalistik, desain grafis
10. Biaya operasional untuk produksi konten informasi
11. Perlunya peningkatan SDM untuk tugas jurnalistik seperti peliputan / pengumpulan data, pendokumentasian, wawancara, penulisan berita
12. Perlunya sinergitas seluruh OPD dalam memberikan data untuk informasi publik
13. Sarana dan prasarana TIK belum memadai
14. Kurangnya suplay data seluruh OPD, sehingga data instansi yang tersedia disitus web pemerintah
15. Perlunya peningkatan SDM untuk mempublikasikan
16. penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi masih minim
17. Pelayanan layanan persandian

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2018-2023 memiliki Visi **“Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Aman, Adil dan Sejahtera.**

Visi pasangan pimpinan daerah terpilih diatas yang berkaitan dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum yang merupakan urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng rappang adalah dimana urusan Dinas Komunikasi dan Informatika diselenggarakan dalam rangka pemenuhan layanan publik bidang pemanfaatan teknologi dan informatika serta pemenuhan kebutuhan data dan informasi masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimaksud dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang paling berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah

sebagaimana dirumuskan dalam misi yang kelima dari misi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

“Misi 5 : Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah dalam pelayanan public melalui penerapan good governance dan elektronik governance”

Tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan misi tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah

“Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan”. Sedangkan sasaran yang sesuai dengan tujuan tersebut adalah **Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik”**

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten sidenreng Rappang terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Visi Kabupaten Sidenreng Rappang :				
<i>“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”</i>				
No.	Misi, Program, dan Sasaran Kepala/Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidrap	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Misi V: Mengoptimalkan kinerja dan profesional birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan penerapan good governance			
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			
	Sasaran : Meningkatkan data informasi / statistik sektoral sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi masih minim	Sumber daya manusia pengelolaan data statistic daerah sangat terbatas	Adanya dukungan infrastruktur teknologi informasi dalam aplikasi pengelolaan

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

				data statistic
	Program :			
	Pengembangan Data / Informasi/ Statistik Daerah			
2	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika			
	Sasaran: Meningkatkan jangkauan infrastruktur jaringan internet	Belum Optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan public	1. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK	1. Peraturan bupati tentang fungsi struktur organisasi komunikasi dan informatika
			2. Kurangnya Infrastruktur Teknologi informasi dan komunikasi	Dukungan dari pimpinan daerah untuk pengembangan dan penerapan E-Government yang menyeluruh dan terintegrasi
			3. Kurang tangan ahli IT	Tersedianya rencana induk teknologi informasi dan komunikasi
3	Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			
	Sasaran: Meningkatkan penyebaran informasi dan kerjasama media massa	Pengelolaan informasi dan komunikasi yang belum optimal	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan informasi serta belum adanya pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi	Komitmen pemerintah daerah terhadap optimalisasi pengelolaan informasi dan komunikasi public k
4	Program : Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Program PPIPD)			
	Sasaran: Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan bahasa sandi dalam berkomunikasi untuk keamanan informasi	Penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang	Lemahnya Pemerintah daerah dalam pengelolaan resiko dan kerangka kerja keamanan informasi	Adanya dukungan dan bimbingan dari Badan siber dan sandi negara terkait sistem pengamanan informasi milik pemerintah daerah dan pelatihan personil persandian untuk memiliki akses sandi Dukungan dan support dari Pimpinan OPD

		kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi	Kesenjangan sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi antar Pemerintah Daerah dan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah	Dukungan dan support dari Pimpinan OPD
--	--	---	--	--

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Merujuk pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) Tahun 2015-2019, Visi Kementerian Kominfo untuk Tahun 2015-2019 adalah ‘Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong’. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, upaya untuk mewujudkan visi ini ditekankan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

- a. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
- b. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
- c. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
- d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
- e. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
- f. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
- g. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia

Sesuai dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, sasaran yang akan dicapai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
- b. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
- c. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
- d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan yang juga menjadi leading sector di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran serta regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran dan bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, Kementerian Kominfo untuk Tahun anggaran 2015-2019 menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis. Dilihat dari sasaran Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki beberapa faktor pengambat dalam pencapaian sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

Tabel 3.3 Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Pencapaian Sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika

<p>Sasaran Kementerian Komunikasi Dan Informatika</p>	<p>Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Diskominfo</p>
<p>1 Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangua</p> <p>2 Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan</p> <p>3 Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman</p> <p>4 Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.</p>	<p>keterbatasan lokasi untuk informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● kota ● Banyaknya perangkat IT baik software maupun hardware yang belum terintegrasi sehingga pencarian / sinkronisasi data menjadi sulit ● Belum terhubungnya perangkat daerah diluar kantor sekretariat daerah secara online ● Masih banyak SDM yang belum mempunyai kompetensi di bidang IT.

3.3.Lembaga Sandi Negara

Selaras dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Seksi Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Untuk menjalankan tugas tersebut, Seksi Persandian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan daerah;
2. penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
3. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota lingkungan provinsi;

4. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan sandi;
5. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi operasional pengamanan komunikasi sandi;
6. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
7. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
8. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
9. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
10. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
11. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
12. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi operasional pengamanan komunikasi sandi;
13. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi operasional pengamanan komunikasi sandi;
14. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
15. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
16. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
17. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
18. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
19. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah

daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Merujuk pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang, dampak hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, serta tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, dapat ditarik beberapa catatan penting untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang administrasi, statistik dan teknologi informatika.
2. Keterbukaan Informasi yang belum sepenuhnya terlaksana
3. Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik
4. Maraknya Berita Hoaks
5. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah persandian
6. Perkembangan Teknologi Informasi
7. Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah dan Masyarakat akan arti pentingnya data serta pengamanan data dan informasi dan informasi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang tidak bisa lepas dari isu- isu strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan perubahan nomenklatur terhadap perangkat daerah yang ada, termasuk terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

Dalam rangka menggali isu-isu strategis yang dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun kedepan, maka perlu dicari permasalahan-permasalahan dari masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang .

Berikut ini diuraikan identifikasi permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang seperti pada tabel berikut ini.

1. Masih ada daerah yang belum memiliki akses jaringan internet
2. Terbatasnya infrastruktur layanan internet
3. Masalah penyediaan internet berada ditangan pengusaha (misalnya PT.Telkom) bukan di pemerintah daerah, sehingga sulit bagi pemerintah daerah untuk menyediakan jaringan internet jika pelaku usahanya belum tertarik
4. Untuk membangun jaringan internet, investigasi yang dibutuhkan sangat besar dan anggaran pemerintah daerah tidak mencukupi
5. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih sangat terbatas dipublikasikan memalui media
6. Perlunya peningkatan SDM dalam Pelayanan informasi Publik
7. Dibutuhkan sosialisasi edukasi terkait keterbukaan informasi publik

8. Kemitraan dengan media perlu dipertahankan serta pemberdayaan dan pembinaan lembaga komunikasi publik
9. Perlunya peningkatan SDM untuk pembuatan konten seperti infogradi, video, animasi, produk, jurnalistik, desain grafis
10. Biaya operasional untuk produksi konten informasi
11. Perlunya peningkatan SDM untuk tugas jurnalistik seperti peliputan / pengumpulan data, pendokumentasian, wawancara, penulisan berita
12. Perlunya sinergitas seluruh OPD dalam memberikan data untuk informasi publik
13. Sarana dan prasarana TIK belum memadai
14. Kurangnya suplay data seluruh OPD, sehingga data instansi yang tersedia disitus web pemerintah
15. Perlunya peningkatan SDM untuk mempublikasikan
16. penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi masih minim
17. Pelayanan layanan persandian

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2018-2023 memiliki Visi **“Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Aman, Adil dan Sejahtera.**

Visi pasangan pimpinan daerah terpilih diatas yang berkaitan dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum yang merupakan urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng rappang adalah dimana urusan Dinas Komunikasi dan Informatika diselenggarakan dalam rangka pemenuhan layanan publik bidang pemanfaatan teknologi dan informatika serta pemenuhan kebutuhan data dan informasi masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimaksud dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang paling berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah

sebagaimana dirumuskan dalam misi yang kelima dari misi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

“Misi 5 : Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah dalam pelayanan public melalui penerapan good governance dan elektronik governance”

Tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan misi tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah

“Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan”. Sedangkan sasaran yang sesuai dengan tujuan tersebut adalah **Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik”**

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten sidenreng Rappang terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Visi Kabupaten Sidenreng Rappang :				
<i>“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”</i>				
No.	Misi, Program, dan Sasaran Kepala/Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidrap	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Misi V: Mengoptimalkan kinerja dan profesional birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan penerapan good governance			
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			
	Sasaran : Meningkatkan data informasi / statistik sektoral sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi masih minim	Sumber daya manusia pengelolaan data statistic daerah sangat terbatas	Adanya dukungan infrastruktur teknologi informasi dalam aplikasi pengelolaan

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

				data statistic
	Program :			
	Pengembangan Data / Informasi/ Statistik Daerah			
2	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika			
	Sasaran: Meningkatkan jangkauan infrastruktur jaringan internet	Belum Optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan public	1. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK	1. Peraturan bupati tentang fungsi struktur organisasi komunikasi dan informatika
			2. Kurangnya Infrastruktur Teknologi informasi dan komunikasi	Dukungan dari pimpinan daerah untuk pengembangan dan penerapan E-Government yang menyeluruh dan terintegrasi
			3. Kurang tangan ahli IT	Tersedianya rencana induk teknologi informasi dan komunikasi
3	Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			
	Sasaran: Meningkatkan penyebaran informasi dan kerjasama media massa	Pengelolaan informasi dan komunikasi yang belum optimal	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan informasi serta belum adanya pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi	Komitmen pemerintah daerah terhadap optimalisasi pengelolaan informasi dan komunikasi public k
4	Program : Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Program PPIPD)			
	Sasaran: Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan bahasa sandi dalam berkomunikasi untuk keamanan informasi	Penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang	Lemahnya Pemerintah daerah dalam pengelolaan resiko dan kerangka kerja keamanan informasi	Adanya dukungan dan bimbingan dari Badan siber dan sandi negara terkait sistem pengamanan informasi milik pemerintah daerah dan pelatihan personil persandian untuk memiliki akses sandi Dukungan dan support dari Pimpinan OPD

		kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi	Kesenjangan sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi antar Pemerintah Daerah dan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah	Dukungan dan support dari Pimpinan OPD
--	--	---	--	--

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Merujuk pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) Tahun 2015-2019, Visi Kementerian Kominfo untuk Tahun 2015-2019 adalah ‘Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong’. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, upaya untuk mewujudkan visi ini ditekankan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

- a. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
- b. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
- c. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
- d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
- e. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
- f. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
- g. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia

Sesuai dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, sasaran yang akan dicapai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
- b. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
- c. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
- d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan yang juga menjadi leading sector di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran serta regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran dan bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, Kementerian Kominfo untuk Tahun anggaran 2015-2019 menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis. Dilihat dari sasaran Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki beberapa faktor pengambat dalam pencapaian sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

Tabel 3.3 Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Pencapaian Sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika

<p>Sasaran Kementerian Komunikasi Dan Informatika</p>	<p>Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Diskominfo</p>
<p>1 Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangua</p> <p>2 Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan</p> <p>3 Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman</p> <p>4 Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.</p>	<p>keterbatasan lokasi untuk informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● kota ● Banyaknya perangkat IT baik software maupun hardware yang belum terintegrasi sehingga pencarian / sinkronisasi data menjadi sulit ● Belum terhubungnya perangkat daerah diluar kantor sekretariat daerah secara online ● Masih banyak SDM yang belum mempunyai kompetensi di bidang IT.

3.3.Lembaga Sandi Negara

Selaras dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Seksi Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Untuk menjalankan tugas tersebut, Seksi Persandian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan daerah;
2. penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
3. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota lingkungan provinsi;

4. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan sandi;
5. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi operasional pengamanan komunikasi sandi;
6. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
7. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
8. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
9. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
10. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
11. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
12. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi operasional pengamanan komunikasi sandi;
13. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi operasional pengamanan komunikasi sandi;
14. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
15. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
16. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
17. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
18. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
19. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah

daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Merujuk pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang, dampak hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, serta tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, dapat ditarik beberapa catatan penting untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang administrasi, statistik dan teknologi informatika.
2. Keterbukaan Informasi yang belum sepenuhnya terlaksana
3. Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik
4. Maraknya Berita Hoaks
5. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah persandian
6. Perkembangan Teknologi Informasi
7. Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah dan Masyarakat akan arti pentingnya data serta pengamanan data dan informasi dan informasi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Untuk mewujudkan visi dan misi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

Tujuan

1. Meningkatkan Akses terhadap masyarakat terhadap informasi dan komunikasi public
2. Meningkatkan kualitas pelayanan data statistik
3. Meningkatkan kualitas ketersediaan dan keamanan Data

Sasaran

1. Meningkatnya jangkauan infrastruktur jaringan internet
2. Meningkatnya Penyebarluasan informasi dan kerjasama media massa
3. Meningkatnya data/informasi/statistik sektoral sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan
4. Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan bahasa sandi dalam berkomunikasi untuk keamanan informasi

Tabel 4.1. Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

No	RPJM		Renstra PD	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Meningkatnya akutanbilas kinerja Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan Komunikasi Publik 2. Meningkatkan kualiatas pelayanan data statistik 3. Meningkatkan kualiatas, ketersediaan dan Keamanan data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jangkauan Infrastruktur jaringan internet. 2. Meningkatnya penyebarluasan informasi dan kerjasama media massa <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya data/informasi / statistic sektoral sebagai bahan untuk perencanaan oembangunan 2. Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan bahasa sandi dalam berkomunikasi untuk keamanan informasi

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika selama 5 (lima) tahun kedepan diuraikan pada tabel berikut ini.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tabel TC 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan komunikasi public		Persentase luas wilayah yang tercoverage jaringan internet	71,98 %	75,74%	78,97%	83,83%	89,02%
		Meningkatnya jangkauan infrastruktur jaringan internet	Persentase Luas Wilayah yang terjangkau Infrastruktur jaringan internet dan infrastruktur lainnya	71,98%	75,74%	78,97%	83,83%	89,02%
		Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa	Persentase penyebaran informasi dan kerjasama media yang dikelola	36%	50%	57%	79%	100%
2	Meningkatkan kualitas Pelayanan data statistik		Persentase data statistik yang dipublikasikan	100	100	100	100	100
		Meningkatnya data/informasi /statistik sektoral sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan	Persentase dokumen data / informasi dan statistik sektoral yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan keamanan Data		Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam berkomunikasi perangkat daerah	25	29	29	29	29
		Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan bahasa sandi dalam berkomunikasi untuk keamanan informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam berkomunikasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018– 2023.

VISI “Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”				
Misi 5.Mengoptimalkan Kinerja dan professional birokrasi pemerintah daerah dalam penerapan Good Governance				
No.	Tujuan	Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	meningkatkan akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan komunikasi publik	Meningkatnya jangkauan infrastruktur jaringan internet	Penerapan layanan e-government di instansi pemerintah.	Peningkatan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintah melalui pemanfaatan TIK
			Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta mempermudah akses informasi publik	Merwujudkan ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah
		Persentase Luas Wilayah yang terjangkau Infrastruktur jaringan intenet dan infrastruktur lainnya	Mendorong pemanfaatan data baik internal maupun publik (tata kelola data)	Satu Data dalam Mendukung Infrastruktur dan Tata Kelola Penyelenggaraan Statistik

		Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa	Optimalisasi penyebaran informasi publik dan kerjasama media massa	Penambahan frekuensi penyebaran informasi publik
2	Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan keamanan data	Meningkatnya data/informasi/statistik sektoral sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan	meningkatkan pengelolaan data potensi komunikasi dan informatika serta data sektoral	Menerbitkan data potensi statistik sektoral (Sidenreng rappang dalam Angka)
		Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan bahasa sandi dalam berkomunikasi untuk keamanan informasi	Melaksanakan sistem manajemen pengamanan informasi secara komprehensif	Pembangunan sistem keamanan informasi pemerintah Daerah
			melaksanakan pengembangan layanan keamanan informasi yang berorientasi kepada kebutuhan pengguna	

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritas kebijakan tersebut tidak berarti program/kegiatan pembangunan operasional OPD selain yang diprioritaskan tidak berjalan, ia tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategi yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategi lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

Tabel 5.2 Maktriks dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					PROGRAM	
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	3	
1	meningkatkan akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan komunikasi public	Meningkatnya jangkauan infrastruktur jaringan internet	Penerapan layanan e- government di instansi pemerintah.	Peningkatan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintah melalui pemanfaatan TIK	Peningkatan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintah melalui pemanfaatan TIK	Peningkatan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintah melalui pemanfaatan TIK	Peningkatan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintah melalui pemanfaatan TIK	Peningkatan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintah melalui pemanfaatan TIK	1	Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa
									2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta mempermudah akses informasi public	Merwujudkan ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah	Merwujudkan ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah	Merwujudkan ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah	Merwujudkan ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah	Merwujudkan ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah	1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

			Optimalisasi penyebaran informasi publik dan kerjasama media massa	Penambahan frekuensi penyebaran informasi publik	Penambahan frekuensi penyebaran informasi publik	Penambahan frekuensi penyebaran informasi publik	Penambahan frekuensi penyebaran informasi publik	Penambahan frekuensi penyebaran informasi publik	2 Program Kerjasama informasi dengan mass media
									3 Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
									4 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
2	Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan keamanan data	Meningkatnya data / informasi statistik sektoral sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan	meningkatkan pengelolaan data potensi komunikasi dan informatika serta data sektoral	Menerbitkan data potensi statistik sektoral (Sidenreng rappang dalam Angka)	Menerbitkan data potensi statistik sektoral (Sidenreng rappang dalam Angka)	Menerbitkan data potensi statistik sektoral (Sidenreng rappang dalam Angka)	Menerbitkan data potensi statistik sektoral (Sidenreng rappang dalam Angka)	Menerbitkan data potensi statistik sektoral (Sidenreng rappang dalam Angka)	1 Program Pengembangan data informasi/statistik daerah
									Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan bahasa sandi dalam berkomunikasi untuk keamanan	Melaksanakan penerapan sistem manajemen pengamanan informasi secara komprehensif	Pembangunan sistem keamanan informasi pemerintah Daerah	Pembangunan sistem keamanan informasi pemerintah Daerah	Pembangunan sistem keamanan informasi pemerintah Daerah	Pembangunan sistem keamanan informasi pemerintah Daerah	Pembangunan sistem keamanan informasi pemerintah Daerah	1 Program Identifikasi dan Deteksi

		informasi							
			melaksanakan pengembangan layanan keamanan informasi yang berorientasi kepada kebutuhan pengguna						2 Program proteksi
									3 Program Penanggulangan dan pemulihan
									4 Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (PIIP)

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
INDIKATIF

Dengan mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Sidenreng Rappang, perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan dalam periode 2018-2023.

6.1. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan di bidang Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian.

Selanjutnya kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 akan direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Informasi dan Komunikasin Publik

Sub Keegiatannya adalah

- Pengeloaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
- Pengelolaan media komunikasi publik
- Pelayanan informasi publik
- Layanan hubungan media
- Penguatan Kapasitas sumber Daya komunikasi publik
- Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah
- Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas

2. Program Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Sub Keegiatannya adalah

- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Infra Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah

- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah

- Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Sub Keegiatannya adalah

- Koordinasi dan Sikronisasi Pengumpulan , Pengelohan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

- Membangun Metadata Statistik Sektoral

4. Program penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah (PPIPD)

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / kota

Sub Keegiatannya adalah

- Penetapan kebijakan Tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan Pengelohan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- Pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yaitu

- Operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan yaitu

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yaitu

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan / Triwulan /Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah

- PenataUsahaan Barang Milik Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Keegiatannya adalah :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Keegiatannya yaitu

- Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan pada tabel berikut :

TABEL T.C.27

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2020

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (QUTCOME) /KEGIATAN (QUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2018	REALISASI PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2019		2020			
						Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)		
1	2		3	4				7			
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
Meningkatkan akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan publik	Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa	2.09.01.01.25	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase KIM, Media dan layanan publik yang dikelola					2,212,008,747	DINAS KOMINFO	PANGKAJENE SIDENRENG
			Pengumpulan data dan informasi kebijakan pemerintah daerah	Jumlah dokumentasi kegiatan pemerintah daerah		-	-	483 kali	360,603,747		
			Penyebarluasan informasi publik melalui media	jumlah media cetak, media publikasi pemerintah daerah				3 media	1,679,055,000		
			Pelayanan informasi publik dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi public	Jumlah pelayanan informasi publik (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi)				-	25,264,000		

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

			Produksi konten informasi public	Jumlah konten informasi publik pemerintah daerah (media sosial)				3 media sosial	11,367,000	
			Pengelolaan aspirasi publik dan pengaduan online	Jumlah aspirasi publik dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti				407 aduan	25,928,000	
			Pembinaan dan Penyuluhan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah KIM yang dibina				2 kim	109,791,000	
			Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Jumlah Pendistribusian Informasi melalui media massa dan media lainnya			1,664,931,505			DINAS KOMINFO
			Penyebarluasan Informasi pembangunan Daerah	Jumlah Media (cetak dan Elektronik)	2		1,105,210,000			
			Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemda	480		464,721,505			
			Penyerbaluasan Informasi yang Bersifat Penyuluh Bagi Masyarakat	Jumlah Penyerbaluasan Informasi yang Bersifat Penyuluh Bagi Masyarakat	3		95,000,000			
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terwujudnya sistem informasi layanan gerak dan aduan			788,635,000			
			Peyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	Terpublikasinya kegiatan pemerintah Daerah melalui Media Online	12		788,635,000			
			program Mengintensifkan Penanganan pengaduan Masyarakat	Jumlah Informasi dan Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti			38,180,000			

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Meningkatkan akses terhadap masyarakat melalui informasi dengan publik			Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat	Jumlah Informasi dan Pengaduan Masyarakat		730	38,180,000					
	Meningkatnya jangkauan infrastruktur jaringan internet	2.09.01.01.24	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Infrastruktur dan perangkat sistem teknologi Informasi dan komunikasi yang terpasang dan digunakan					2,687,274,861	DINAS KOMINFO	PANGKAJENE SIDENRENG	
				Persentase aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan			-					
			Pengembangan infrastruktur dan sumber daya TIK pemerintah daerah	Jumlah infrastruktur dan sumber daya TIK yang terbangun			30 unit	674,613,500				
			Pengembangan dan pengelolaan aplikasi	jumlah aplikasi informatika yang dikembangkan dan dikelola			5 aplikasi	146,165,522				
			Peningkatan sumber daya manusia E-Government	Jumlah pegawai yang mendapat pelatihan TIK (orang)			2 org	12,129,839				
			Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	jumlah menara telekomunikasi yang pantau			143 menara	3,860,000				
			Layanan Website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah daerah	Jumlah berita dan informasi pada situs Web Pemerintah Daerah			501 berita dan informasi	3,247,000				
			Pengadaan dan pemeliharaan hardware TIK	Jumlah server/pc dan perangkat keras TIK yang tersedia dan dipelihara			PC 1, Perangkat jaringan 50 lengkap	47,069,000				
			Layanan Akses internet	Waktu layanan akses internet			200 mbps	1,800,190,000				

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

			Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	Persentase Peningkatan Perencanaan, Pengawasan, Monitoring dan Pelaporan			3,734,458,126			DINAS KOMINFO	PANGKAJENE SIDENRENG
			Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terciptanya peliputan aktifitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka publikasi melalui media elektronik dan media cetak		129	34,999,226				
			Pengadaan Alat studio dan komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi komunikasi informatika berupa server, akses poin /wifi, microtik RB 750		11	110,665,000				
			Pengembangan komunikasi, informatika dan media massa	Tersedianya jumlah TIK yang dikelola dan dikembangkan		6	149,154,900				
			Pengembangan jaringan Internet	Layanan Interkoneksi jaringan internet pemerintah daerah		20	1,939,639,000				
			Layanan Akses Internet	Tersedianya layanan akses internet		12	1,500,000,000				
Meningkatkan kualitas ketersediaan dan Keamanan Data	Meningkatnya data/informasi/statistik sektoral sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan	2.09.01.01.22	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase kompilasi produk statistik sektoral yang tersedia					49,100,000	DINAS KOMINFO	PANGKAJENE SIDENRENG
			Penyusunan kompilasi produk statistik sektoral	Jumlah jenis buku statistik sektoral yang tersedia				5 buku	40,000,000		

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Meningkatkan kualitas ketersediaan dan Keamanan Data	n		Pengembangan aplikasi e-database	Jumlah aplikasi database dikembangkan dan dikelola			1 aplikasi	9,100,000			
			Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Tingkat Penggunaan Data/Informasi untuk Perencanaan & Pembangunan						DINAS KOMINFO	PANGKAJENE SIDENRENG
			Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Publikasi data statistik daerah	5	66,108,193					
		2.09.01.01.26	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (PROGRAM PPIPD)	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) dalam ruang lingkup tata kelola					102,348,320	DINAS KOMINFO	PANGKAJENE SIDENRENG
			Penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi	jumlah kebijakan tatakelola keamanan informasi			1 kebijakan	21,118,820			
			Penerapan sistem manajemen pengamanan informasi	Jumlah sistem yang diterapkan dalam manajemen keamanan informasi			2 kebijakan	7,813,000			
			Literasi keamanan informasi pemerintah daerah dan publik	Indeks kesadaran informasi (security awarness indeks)			1	5,388,000			
			Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah di bidang keamanan informasi	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi			2 unit	13,574,500			

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

			Penyelenggaraan jaringan komunikasi sandi	persentase keterhubungan perangkat daerah dalam jaringan komunikasi sandi			100%	54,454,000		
			Program Identifikasi dan deteksi	Hasil Inventarisasi tentang data celah kerawanan dan nilai resiko keamanan informasi		97,210,718			DINAS KOMINFO	PANGKAJENE SIDENRENG
			Identifikasi dan pemetaan Asset Informasi atau Sstem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan dan data celah keamanan informasi	2,000	14,416,750				
			Pengembangan Kapasitas Teknologi keamanan informasi di bidang Identifikasi dan Deteksi	Tersedianya alat teknologi keamanan Informasi	3	67,912,750				
			Monotoring Evaluasi dan pelaporan keamanan informasi di bidang Identifikasi dan deteksi di lingkungan pemerintah Daerah	Tersedianya laporan celah keamanan Informasi lingkungan daerah	4	14,881,218				
			Program Proteksi	Berita acara pelaksanaan kegiatan sosialisasi kemanan informasi dan penetapan tingkat kerahasiaan informasi publik yang dikecualikan			100%		DINAS KOMINFO	PANGKAJENE SIDENRENG
			peningkatan kesadaran keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah	Terlaksananya kegiatan sosialisasi keamanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah	1	27,010,600				

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

			Peningkatan kompetensi sumber daya manusia keamanan informasi di bidang proteksi di lingkungan pemerintah daerah	Terlaksananya kegiatan Kontra Penginderaan oleh BSSN		1	32,074,533				
			Perlindungan Informasi pada kegiatan penting dan fasilitas penting di lingkungan pemerintah daerah	Terkirimnya personil persandian mengikuti diklat persandian		7	41,978,500				
			Program Penanggulangan dan pemulihan	Laporan tentang terjadinya insiden keamanan informasi dan pemulihan data dan jaringan			114,042,000			DINAS KOMINFO	PANGKAJENE SIDENRENG
			Peningkatan Kompetensi sumber daya manusia keamanan informasi di bidang penanggulangan dan pemulihan di lingkungan pemerintah daerah	Absensi kehadiran personil sandi semakin membaik		14	94,200,000				
			Pengembangan Kapasitas dan pemeliharaan perangkat teknologi keamanan informasi di bidang penanggulangan dan pemulihan di lingkungan pemerintah daerah	Terpeliharanya perangkat teknologi keamanan informasi		21	19,842,000				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, keuangan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran			862,879,116	605,460,334		DINAS KOMINFO	PANGKAJENE SIDENRENG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

	PD (Dinas Kominfo)									
			Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah dokumen bermaterai		1,020	5,160,000	1071 lbr	5,460,000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	72,439,195	12 bln	80,244,480	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12	76,238,000	12 bln		
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Waktu penyediaan jasa jaminan milik daerah						
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah dan Jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan			8,475,645	12 bln	4,502,490	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12	128,919,000	12 bln	4,350,500		
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12	22,341,000	12 bln	23,064,000		
			Penyediaan instalisasi listrik penerangan bangunan kantor	jumlah dan jenis komponen listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan				-		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	576	59,131,000	192 eksamplar	24,977,000		
			Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke keluar daerah	101	194,977,526	200 kali	200,822,864		
			Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	41	851,750	27 kali	2,534,400		

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu pelayanan Administrasi perkantoran		12	294,346,000	12 bln	259,504,600		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur			308,902,000		350,424,558	DINAS KOMINFO	PANGKAJENE SIDENRENG
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan		1	6,550,000	2 unit	6,500,000		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, keuangan PD (Dinas Kominfo)		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan		6	79,000,000	4 unit	104,800,000		
			pengadaan mebeleur	jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan		7	17,050,000	1 unit	5,000,000		
			Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		1	53,000,000	1 unit	8,049,909		

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

			Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala				4 unit	69,000,000		
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala				4 unit	21,823,600		
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/ berkala	10	153,302,000		10 unit	135,251,049		
			Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan			17,732,000		5,471,800	DINAS KOMINFO	PANGKAJENE SIDENRENG
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	17,732,000		4 laporan	5,471,800		
JUMLAH							7,794,142,291		6,012,088,620		

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 -2023
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (QUTCOME) /KEGIATAN (QUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2018	REALISASI PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				2021		2022		2023			
				Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)		
16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi		1,231,558,000	100%	1,280,008,000	100%	1,307,833,000	DINAS KOMINFO	PANGKAJENE SIDENRENG	
	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/ kota	Persentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola		1,231,558,000	100%	1,280,008,000	100%	1,307,833,000			
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	jumlah aspirasi publik dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti jumlah konten informasi publik pemerintah daerah (media sosial)	1000 aduan 3 media sosial	5,316,000							
		Jumlah peliputan dan konten informasi publik pemerintah daerah			480 kali	265,690,000	480 kali	267,690.000			
		Jumlah dokumentasi video kegiatan pemerintah daerah			120 video dan berita	8.000.000	120 video dan berita	8,737.000			

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	jumlah media komunikasi milik pemerintah daerah		-	4 media sosial	2,579,000	4 media sosial	2,630,000		
		Pengelolaan website pemda			650 data dan informasi		650 data dan informasi			
	Pelayanan Informasi Publik	jumlah dokumentasi kegiatan pemerintah daerah	480 kali	173,731,000						
		Jumlah aspirasi publik dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti			20 aduan	27,528,000	25 aduan	27,804,000		
		jumlah pemohon informasi yang dapat dilayani (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi)			10 pemohon Informasi	20,200,000	12 pemohon informasi	20,400,000		
	Layanan Hubungan Media	jumlah media cetak ,media publikasi pemerintah daerah	3 jenis media	1,052,511,000	3 jenis media	956,011,,000	3 jenis media	965,572,000		
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	jumlah peserta pelatihan bidang komunikasi dan informatika (orang)		-			1 Orang	5,000,000		
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah									
	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Jumlah KIM yang dibina					11 KIM	10,000,000		
16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) Yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		2,074,960,000	100%	2,214,390,000	100%	2,259,719,000	DINAS KOMINFO	PANGKAJENE SIDENRENG
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KIM, Media dan layanan publik yang dikelola		1,804,810,000		1,804,010,000		1,825,187,000		

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah domain yang dikelola	1 domain	3,010,000	1 domain	3,010,000	1 domain	3,070,000		
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah bandwidth akses layanan internet (ISP)	300 Mbps	1,801,800,000	300 Mbps	1,804,,810,000	300 Mbps	1,819,818,000		
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase domain dan sub domain yang dikelola		270,150,000		409,580,000		434,532,000	DINAS KOMINFO	PANGKAJENE SIDENRENG
Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah menara telekomunikasi yang dipantau	150 menara	5,054,000	155 menara	9,484,000	155 menara	9,674,000		
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	jumlah PC yang dipelihara jumlah perangkat keras TIK yang tersedia dan dipelihara jumlah server yang dipelihara	2 UNIT 80 perangkat 2 server	54,941,000	2 UNIT 110 perangkat 2 server	93,941,000	2 UNIT 140 perangkat 2 server	100,940,000		
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah aplikasi informatika yang dikembangkan dan dikelola	5 aplikasi	210,155,000	5 aplikasi	306,155,000	5 aplikasi	309,217,000		
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah infrastruktur sumber daya TIK yang terbangun					4 unit	4.701,000		
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	jumlah pegawai yang mendapat pelatihan TIK					2 orang	10,000,000		

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100	70,500,000	100	71,205,000	DINAS KOMINFO	PANGKAJENE SIDENRENG
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase data statistik yang tersedia		100	70,500,000	100	71,205,000	DINAS KOMINFO	PANGKAJENE SIDENRENG
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah jenis buku statistik sektoral yang tersedia jumlah jenis data sektoral yang terkumpul dan diolah		5 jenis buku 29 jenis data sektoral	60,500,000	5 jenis buku 29 jenis data sektoral	61,105,000		
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	jumlah aplikasi database dikembangkan dan dikelola		1 aplikasi	10,000,000	1 aplikasi	10,000,000		
21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (PROGRAM PPIPD)	Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah	91,757,000	62	94,069,000	100	95,010,000	DINAS KOMINFO	PANGKAJENE SIDENRENG
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase perangkat daerah yang menggunakan pengamanan persandian	48,723,000		45,069,000		45,520,000		

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi 2 kebijakan	14,081,000	1 kebijakan	13,032,000	2 kebijakan	13,163,000		
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah aparatur pemerintah daerah yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi jumlah infrastruktur perangkat keras,lunak atau fasilitas teknologi 2 orang 2 unit	17,659,000	2 orang 2 unit	15,659,000	2 orang 2 unit	15,815,000		
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah koordinasi yang dilaksanakan		4 kali	4,983,000	4 kali	5,033,000		
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah insiden keamanan informai yang dapat ditanggulangi d jumlah kesadaran keamanan informasi (security keamanan awarennes indeks) jumlah sistem yang diterapkan dalam manajemen keamanan informasi 2 insiden 2 level 4 sistem	8,523,000 8,460,000	2 insiden 2level 2 sistem	4,440,000 3,560,000 3,560,000	2 insiden 2 level 2 sistem	4,440,000 3,560,000 3,560,000		
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase yang telah menggunakan pola jaring komunikasi sandi	43,034,000		49,000,000		49,490,000		
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah keterhubungan perangkat daerah dalam jaring komunikasi sandi 29 opd	43,034,000	29 opd	49,000,000	29 opd	49,490,000		
16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2,832,459,000	100	2,818,259,280	100	2,851,574,853	DINAS KOMINFO	PANGKAJENE SIDENRENG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja perangkat daerah	12,565,000	100	15,075,000	100	15,226,000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 4 dokumen	9,985,000	4 dokumen	5,500,000	4 dokumen	5,555,000		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPASKPD yang tersusun 1 dokumen	2,580,000	1 dokumen	5,500,000	1 dokumen	5,555,000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang tersusun 1 dokumen		1 dokumen	4,075,000	1 dokumen	4,116,000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,173,758,000	100	2,195,387,280	100	2,217,342,853		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan asn 12 bln	2,162,928,000	12 bulan	2,184,557,280	12 bulan	2,206,404,853		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan yang tersusun 5 laporan	10,830,000	5 laporan	10,830,000	5 laporan	10,938,000		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	5,000,000	100	5,100,000		

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kendaraan dinas terbayar premi asuransi		1 unit	5.000,000	1 unit	5,100,000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	299,676,000	100	220,125,000	100	222,384,000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah bahan baku bangunan yang terpakai	15 jenis	15 jenis	2,000,000	15 jenis	2,000,000		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	2,400,000	1,809,000	12 bulan	1,845,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	200 eksamplar	200 Eksamplar	25,316,000	25,316,000	200 eksamplar	25,569,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ke dalam dan keluar daerah	315 kali	337 kali	271,960,000	188,000,000	350 kali	189,880,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah	16,350,000	100	15,261,000	100	20,414,000	DINAS KOMINFO	PANGKAJENE SIDENRENG
Pengadaan Mebel	jumlah dan jenis yang diadakan					7 unit	5,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah dan jenis peralatan mesin lainnya yang diadakan	5 unit	5 unit	16,350,000	15,261,000	5 unit	15,414,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	212,791,000	100	233,971,000	100	236,324,000	DINAS KOMINFO	PANGKAJENE SIDENRENG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah persediaan surat menyurat 1125 lembar	2,220,000	1181 lembar	2,400,000	1240 lembar	2,448,000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	76,500,000	12 bulan	85,500,000	12 bulan	86,355,000		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan	5,022,000	12 bulan	5,022,000	12 bulan	5,122,000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor 12 bulan	129,049,000	12 bulan	141,049,000	12 bulan	142,399,000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117,319,000	100	133,440,000	100	134,774,000	DINAS KOMINFO	PANGKAJENE SIDENRENG
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang dipelihara rutin / berkala jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan 12 unit 12 unit	105,440,000	12 unit 12 unit	105,440,000	12 unit 12 unit	106,494,000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah dan jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 10 unit	11,879,000	10 unit	20,000,000	10 unit	20,200,000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah dan jenis pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara 1 unit		1 unit	8,000,000	1 unit	8,080,000		

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

	Total		6.230.734.000	100	6.477.226,280	100	6.585,341.853	DINAS KOMINFO	PANGKAJENE SIDENRENG
--	--------------	--	----------------------	------------	----------------------	------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------

BAB VII

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator Outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2023.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase luas wilayah yang tercoverage jaringan internet	71,98	71,98	75,74	78,97	83,83	89,02	89,02
	Persandian							
1	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam berkomunikasi perangkat daerah	25 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD
14	Statistik							
	Persentase data statistik yang dipublikasikan	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten sidenreng Rappang Tahun 2018—2023 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Sidenreng Rappang, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang , serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berada pada empat OPD sebelumnya hingga saat ini serta melakukan penyesuaian dengan konsultasi dengan Pusat (Kemenkominfo, Lembaga Sandi Negara, Badan Pusat Statistik dan Kemendagri). Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan. Selanjutnya Perubahan rencana strategis 2018-2023 akan digunakan sebagai acuan bagi pelaku pembangunan di bidang komunikasi dan informatika serta dalam implementasinya harus memperhatikan kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renstra ini merupakan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan, dengan demikian akan terjadi kesamaan arah pembangunan selama 5 tahun kedepan.
2. Renstra ini akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja setiap tahun baik yang bersumber dari APBD.

Pangkajene Sidenreng ,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

H.BACHTIAR,SHi.M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 196012310198603 1 048

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

